

EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ANTAR ORMAS OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Arif Indra Komara

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
E-mail Korespondensi: arifindrakomara@gmail.com

Abstract

This study was driven by social conflicts among Community Organizations in West Java Province, which often involved violence and resulted in casualties. These conflicts stemmed from inter-organizational egos and competition over economic resources such as waste, parking spaces, and informal services like "Pak Ogah." The research aims to explore the government's preventive measures against social conflict and to understand the perspective of Community Organizations in maintaining their existence. The study applies Makmur's effectiveness theory, which emphasizes the alignment between expectations, implementation, and outcomes in evaluating program success. Effective action reflects minimal gaps between goals and results, while ineffectiveness indicates a misalignment. Using a qualitative descriptive method, this research describes and analyzes field events through observation, interviews, and literature studies. Primary data were gathered directly through field techniques, while secondary data came from relevant books, archives, and documents. The findings indicate that the social conflicts are driven by both internal factors—such as rivalry among members and organizational interests—and external factors, including weak government oversight and limited intervention. The study highlights the need for early conflict mitigation and emphasizes the critical role of local government in maintaining social order and supporting peaceful inter-organizational relations.

Keywords: Social Conflict; Community Organization.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik sosial antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Jawa Barat yang memicu kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Konflik dipicu oleh ego sektoral dan perebutan sumber ekonomi seperti limbah, lahan parkir, dan praktik informal seperti "Pak Ogah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mencegah konflik sosial serta memahami perspektif Ormas dalam menjaga eksistensinya. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas Makmur, yang menekankan pada kesesuaian antara harapan, implementasi, dan hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial antar Ormas disebabkan oleh faktor internal, seperti persaingan antar anggota dan kepentingan kelompok, serta faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya intervensi pemerintah. Studi ini menekankan pentingnya mitigasi konflik dan peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Konflik Sosial; Organisasi Kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan sosial politik dan keamanan akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena dapat memicu terjadinya konflik sosial yang

mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional, terutama pasca pelaksanaan Pemilihan Presiden Serentak Tahun 2019, terjadi polarisasi dukungan politik

nasional, selanjutnya agenda Politik lokal yakni Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di 270 Kabupaten/Kota. Kondisi aktual tersebut, berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Kondisi sosial tersebut seringkali terjadi tindak pelanggaran di luar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang memicu terjadinya konflik sosial, seperti halnya tawuran antar kelompok, geng motor, serta yang berbau radikalisme yang berujung kepada terjadinya konflik sosial di masyarakat sehingga menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu keutuhan dan mengikis semangat nasionalisme bangsa. Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat Industri bukan lagi dianggap sebagai pusat perekonomian biasa namun bisa menjadi awal mula bentrok antar kepentingan masyarakat yang dapat memecah belah bangsa. (Karina, 2017)

Seperti halnya bentrok antar Organisasi Kemasyarakatan antara Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang terjadi akibat perebutan limbah ekonomis pada tanggal 24 November 2021, tepatnya di Jl. Interchange tol Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Bentrokan berawal sekitar pukul 12.05 WIB. Saat itu sekelompok Ormas Gabungan sedang berkumpul di Lapangan Karangpawitan Provinsi Jawa Barat hendak menuju

Karawang International Industrial City (KIIC). Sedangkan Ormas GMBI sedang melaksanakan kegiatan di Karawang International Industrial City (KIIC) untuk melakukan negosiasi perihal penggunaan limbah ekonomis. 1 unit mobil Honda Brio yang berisi 4 orang anggota GMBI Distrik Rembang hendak menuju Karawang International Industrial City (KIIC) untuk bergabung dengan rekan-rekannya yang sudah lebih dulu di lokasi. Diketahui bahwa 1 unit mobil Honda Brio tersebut yang berisi 4 Orang anggota GMBI tersasar ke arah pusat kota Provinsi Jawa Barat dan bertemu Ormas Gabungan yang sedang berkumpul di Lapangan Karangpawitan, Melihat kendaraan lawan melintas memicu amarah Ormas Gabungan yang langsung mengejar kendaraan Ormas GMBI hingga di depan Hotel Resinda Jl. Interchange tol Karawang Barat, hingga berujung pengeroyokan terhadap kendaraan Honda Brio yg berisi 4 Orang penumpang yang mengakibatkan 3 orang terluka dan 1 Orang Meninggal Dunia. Pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam mendeteksi dini dan menyelesaikan konflik melalui koordinasi antarinstansi dan pendekatan berbasis komunitas (Brinkerhoff et al., 2012). Efektivitas kebijakan publik tidak hanya bergantung pada perumusan, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan keterlibatan para pemangku kepentingan (Peters, 2015).

Konflik sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Barat bukanlah fenomena tunggal, melainkan bagian dari dinamika sosial yang kompleks, dipicu oleh ketimpangan akses

terhadap sumber daya ekonomi, lemahnya regulasi, serta tidak optimalnya mediasi antar kelompok masyarakat. Kasus bentrokan antara GMPI dan GMBI menjadi bukti bahwa konflik yang berakar pada kepentingan ekonomi dapat berkembang menjadi konflik horizontal jika tidak dikelola secara bijak. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif membangun sistem pencegahan dan penyelesaian konflik yang berbasis data, dialog, dan keadilan sosial. (Pengelolaan Konflik Di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, Dan Poso, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pada Tahun 2011., n.d.)

Pemerintah daerah sebagai representasi negara di tingkat lokal memiliki tanggung jawab utama dalam membangun sistem deteksi dini konflik, khususnya melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas. Pemetaan potensi konflik melalui kerja sama antara aparat pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media lokal harus menjadi bagian dari kebijakan pencegahan yang berkelanjutan. Ketika mekanisme ini dijalankan secara konsisten, maka potensi konflik seperti bentrokan antar Ormas dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kekerasan yang mengancam keselamatan warga dan stabilitas sosial.

Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ego sektoral antar instansi yang sering

kali menghambat sinergi dalam merespons konflik. Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik sosial, serta minimnya pelatihan bagi petugas lapangan dalam bidang resolusi konflik, semakin memperlemah upaya mitigasi. Dalam hal ini, komitmen politik dari pimpinan daerah menjadi sangat menentukan dalam membangun sistem penanganan konflik yang terpadu, responsif, dan berbasis keadilan. (Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Kehidupan Nasional Yang Kondusif Khususnya Pasca Konflik, Gubernur Lemhannas RI Tahun 2009., n.d.)

Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan ketahanan sosial di tingkat lokal. Pemerintah perlu mengintensifkan program pendidikan perdamaian, sosialisasi hukum, dan pelibatan Ormas dalam forum dialog lintas kelompok. Forum Konsultasi Publik, misalnya, dapat dioptimalkan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan perbedaan, dan merumuskan kesepakatan bersama yang inklusif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan sosial antar kelompok yang berbeda latar belakang.

Ke depan, strategi penanganan konflik sosial harus diarahkan pada integrasi antara pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural melalui regulasi dan perangkat hukum yang tegas, sedangkan pendekatan kultural melalui penguatan nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan

solidaritas. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, dan hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar perbaikan yang konkret. Dengan demikian, stabilitas sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja sama antara negara dan seluruh elemen masyarakat. (Maya, 2018)

Melihat permasalahan tersebut, kejadian itu haruslah menjadi atensi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat bertindak segera dan menjadi mediasi dalam penyelesaian konflik antar Organisasi Kemasyarakatan tersebut, agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi dalam menjalankan pemerintahan, termasuk memberikan arahan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai persoalan untuk menuntaskan konflik tersebut dengan segera, agar tidak terjadi lagi. Dalam upaya menanggulangi masalah tersebut, diperlukan metode penanganan melalui kelembagaan secara tepat dan terencana dengan baik serta melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk proses penyelesaian konflik tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan salah satu Program Prioritas Nasional tersebut, salah satunya Penanganan Konflik Sosial dibutuhkan peran, soliditas, sinergitas dan keterpaduan antar seluruh unsur Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui

upaya penanganan konflik sosial di daerah sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konflik sosial di tingkat lokal sering kali berakar pada struktur kekuasaan informal, sumber daya ekonomi, dan identitas kolektif yang bertabrakan (Lund, 2011).

Penanganan konflik sosial merupakan tugas penting yang harus dijalankan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peran kepala daerah menjadi sangat penting dalam penanganan konflik sosial di tingkat daerah untuk menciptakan suasana daerah yang aman, tentram, tertib dan damai. Kondusifitas daerah mutlak diperlukan karena merupakan kunci utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Namun demikian kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dibutuhkan koordinasi, sinergitas dan keterpaduan antar seluruh unsur pemerintahan di daerah, yang salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan amanah dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan konflik sosial yang berhasil cenderung melibatkan pendekatan kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah (Miall et al., 2011). Ego sektoral menjadi salah satu hambatan utama dalam

menciptakan sinergi antarlembaga dalam menangani isu-isu lintas sektoral seperti konflik sosial (Christensen & Lægreid, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani konflik sosial antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pandangan Ormas dalam menjaga eksistensi mereka di tengah dinamika sosial dan persaingan kepentingan. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implementasi penanganan konflik sosial berbasis teori efektivitas Makmur, yang mengukur keselarasan antara harapan, pelaksanaan, dan hasil dalam kebijakan penanganan konflik. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek hukum atau keamanan semata, penelitian ini menempatkan pendekatan sosiologis dan partisipatif sebagai instrumen evaluasi efektivitas tindakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengembangkan model pencegahan konflik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis realitas lokal. (Ahmad, 2020)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Moleong (2008:4) "Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian,

memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data, secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subyek peneliti"

Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pendekatan induktif, seperti yang dijelaskan oleh Nazir (2009:174) dalam bukunya yaitu, Pendekatan Induktif adalah "cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual", pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Silalahi (2012:291) berkata bahwa dalam melaksanakan penelitian diperlukan data sebagai bahan interpretasi dan penyusunan penyelesaian masalah. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dari fenomena empiris, antara lain Observasi, Wawancara, Metode Bahan Visual

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat Nazir (2009:346-374) adalah sebagai berikut, Editing data, Klasifikasi, Tabulasi, Interpretasi data,. Oleh karena itu langkah observasi dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan secara

langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah Konflik Sosial di Provinsi Jawa Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	KOTA BANDUNG	0	200	134	79	137
2	KAB. TASIKMALAYA	20	8	27	41	65
3	KOTA BEKASI	0	0	37	38	25
4	KAB. MAJALENGKA	1	2	17	35	19
5	KOTA TASIKMALAYA	9	0	27	30	45
6	KAB. CIAMIS	0	0	3	30	68
7	KAB. SUBANG	0	0	32	27	29
8	KAB. SUKABUMI	10	8	8	25	22
9	KAB. PURWAKARTA	0	0	12	25	17
10	KAB. GARUT	0	0	31	23	27
11	KAB. CIREBON	0	0	19	22	5
12	KAB. BANDUNG BARAT	0	0	29	21	25
13	KAB BANDUNG	0	0	21	25	29
14	KOTA BOGOR	0	0	10	17	35
15	KOTA CIREBON	0	0	5	12	35
16	KAB. PANGANDARAN	0	0	6	12	7
17	KAB. KARAWANG	5	0	1	12	7
18	KOTA SUKABUMI	0	0	6	10	10
19	KOTA CIMAHI	9	0	9	8	15
20	KAB. CIANJUR	20	0	1	6	26
21	KOTA DEPOK	0	0	11	5	7
22	KAB. BOGOR	1	0	11	4	56
23	KAB. BEKASI	0	0	8	3	23
24	KAB. SUMEDANG	0	0	2	2	9
25	KOTA BANJAR	1	1	1	0	21
26	KAB. KUNINGAN	0	1	0	0	11

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
27	KAB. INDRAMAYU	0	0	0	0	8
JUMLAH		76	220	468	512	783

Sumber:: Opendata.jabarprov.go.id, 2023.

Berkaitan dengan efektifitas penanganan konflik sosial antar organisasi kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka pada bagian ini akan diuraikan secara detail temuan di lapangan dengan mengacu pada menurut Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, diantaranya adalah ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran..

1. Ketepatan Waktu

Dalam upaya untuk melaksanakan ketepatan waktu penanganan konflik, walaupun dirasakan sudah teragendakan sesuai target dan sasaran, akan tetapi Kesbangpol Provinsi Jawa Barat merasa belum seluruhnya dapat menyelesaikan masalah penanganan konflik sosial sampai tuntas. Kendati demikian efektivitas pemanfaatan waktu oleh OPD dalam penanganan konflik, masih terkesan hanya baru dapat dilakukan melalui koordinasi secara administrasi yang belum didukung dengan sistem dan mekanisme kerja yang profesional di bidang penanganan konflik sosial. Karenanya, koordinasi terpadu dalam penanganan

konflik belum dapat terwujud, sebagai akibat dari ego sektoral dari masing-masing Pemerintah Daerah, serta karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka secara keseluruhan Penghitungan anggaran yang efektif dan efisien dalam penanganan konflik sangat diperlukan, karena dapat mengukur sejauh mana keberhasilan dalam penanganan konflik dari segi anggaran yang efisien. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu mengedepankan prinsip efektif dan efisien.

3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dianalisa bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Barat setiap empat bulan sekali membuat dan melaporkan rencana aksi terpadu yang terdiri dari rencana aksi pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik, serta rencana aksi lainnya. Kendati demikian efektivitas ketepatan dalam pengukuran oleh tim terpadu penanganan konflik sosial ini, masih terkesan hanya dilaksanakan melalui koordinasi secara administrasi yang belum didukung dengan sistem dan mekanisme kerja yang profesional di bidang penanganan konflik

sosial. Karenanya, koordinasi terpadu yang diharapkan belum terwujud, sehingga ketepatan pengukuran dari berbagai aspek kurang sesuai dengan yang diinginkan..

4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penghentian konflik tidak serta merta berjalan sendiri, tentunya menggandeng stakeholder terkait seperti TNI/POLRI selaku aparat penegak hukum, sehingga ketepatan dalam menentukan pilihan perlu dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait.

5. Ketepatan Berpikir

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa, Ketepatan berfikir bagi pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di daerahnya, hal ini dapat diperhatikan melalui berbagai aspek seperti kehidupan bermasyarakat setempat dan perilaku kesehariannya baik itu secara positif maupun negatif.

6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami. Sehingga dalam penyelesaian konflik di daerah dapat teratur dan terarah serta tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut bahwa tujuan dalam penyelesaian permasalahan konflik hanya 1 (satu) yaitu adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat, sehingga tidak menghambat progres pembangunan di daerah.

8. Ketepatan Dalam Sasaran

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut bahwa sasaran dalam penyelesaian konflik disini adalah jelas kedua belah pihak yang bertikai merupakan sasaran yang harus dituju. Sebagai contoh ketika ada Ormas yang berkonflik, Para Ketua Ormas yang berkonflik untuk dipanggil melakukan mediasi dan menenangkan anggotanya. Karena Ketua Ormas harus bertanggungjawab atas anggota yang berkonflik di lapangan

SIMPULAN

Efektivitas penanganan konflik sosial antar Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta ego sektoral antar instansi menjadi hambatan utama dalam menyelaraskan program penanganan konflik. Hambatan lainnya termasuk belum maksimalnya koordinasi antar instansi pemerintah dan dinamika konflik di lapangan yang sulit diprediksi. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya menjalankan program yang telah direncanakan, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan penanganan konflik sosial yang ada.

(LKIP Tahun 2016 Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat, n.d.)

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model kolaboratif antar instansi pemerintah dan peran aktor lokal dalam mitigasi konflik. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas SDM di bidang resolusi konflik, serta menyusun sistem deteksi dini berbasis data untuk memetakan potensi konflik secara lebih akurat dan responsif. Pendekatan berbasis komunitas dan pemetaan sosial juga dapat menjadi fokus lanjutan dalam pengembangan kebijakan preventif yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. O. (2020). *Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Jawa Barat*.
- Brinkerhoff, D. W., Wetterberg, A., & Dunn, S. (2012). Service delivery and legitimacy in fragile and conflict-affected states. *Public Management Review*, 14(2), 273–293.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.
- Karina, A. (2017). *Analisis Semiotika Logo SUNMORE*.
- LKIP Tahun 2016 Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat.
- Lund, C. (2011). Fragmented sovereignty: Land reform and conflict management in Uganda. *Development and Change*, 42(3), 531–552.
- Maya, K. (2018). *Efektifitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Meningkatkan Kinerja di Daerah Provinsi DKI Jakarta*.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2011). *Contemporary conflict resolution (3rd ed.)*. Polity Press.
- Penanganan Konflik Sosial Guna Menciptakan Kehidupan Nasional Yang Kondusif Khususnya Pasca Konflik, Gubernur Lemhannas RI Tahun 2009.
- Pengelolaan Konflik Di Indonesia-Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, Dan Poso, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pada Tahun 2011.
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.